

## UPAYA PEMERINTAHAN TSAI ING-WEN MELAWAN TEKANAN *ONE-CHINA PRINCIPLE* PADA ERA XI JINPING

**W.K. Faizin Ahzani**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: wk.faizin@gmail.com

### INFO ARTIKEL

Diterima

1 Maret 2021

Direvisi

16 Maret 2021

Disetujui

15 April 2021

### Keywords :

Sovereignty; One-China  
Principle; small states  
diplomacy; diplomatic  
recognition.

### ABSTRACT

*In fact, China used to only focus on the mainland with one identity, namely the Republic of China which was spearheaded by Dr. Sun Yat-sen and General Chiang Kai-shek, but all started to change when the communist party at that time began to carry out a revolution. Mao Zedong as the leader of the movement then succeeded in taking over China (mainland) from the Kuomintang and driving them to the island of Taiwan. As a result of this, until now there is a dual identity between China and Taiwan. The One-China Principle policy is China's attempt to bind Taiwan, because China considers that Taiwan is also part of China's territory. However, Taiwan considers that they are a sovereign state since then until now during the reign of Tsai Ing-wen. So here the researcher will try to explain how the efforts made by Taiwan by focusing on the Tsai Ing-wen government towards the One-China Principle policy in the Xi Jinping era. Researchers will also use a qualitative descriptive method to explain more deeply about the efforts made by Tsai Ing-wen, through the concept of small state diplomacy and diplomatic recognition. Based on the discussion, it can be concluded that the efforts made by Tsai Ing-wen were sufficient to defend their sovereignty de facto, but Taiwan still needs the support of the big powers to defend their sovereignty from the pressures exerted by China.*

### ABSTRAK

Sejatinya Tiongkok dulu hanya terfokus di pulau utama dengan satu identitas yaitu Republic of China yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen dan Jenderal Chiang Kai-shek, tetapi semua mulai berubah ketika partai komunis pada saat itu mulai melakukan revolusi. Mao Zedong sebagai pemimpin gerakan tersebut kemudian sukses dalam mengambil alih Tiongkok (pulau utama) dari Kuomintang dan mengusir mereka ke pulau Taiwan. Akibat hal tersebut lah hingga saat ini terdapat identitas ganda antara Tiongkok dengan Taiwan. Kebijakan One-China Principle menjadi upaya Tiongkok untuk mengikat Taiwan, karena Tiongkok menganggap Taiwan juga termasuk wilayah kedaulatan Tiongkok. Namun, Taiwan menganggap bahwa mereka merupakan negara yang berdaulat sejak dulu hingga sekarang di masa pemerintahan Tsai Ing-wen. Maka di sini peneliti akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana

### How to cite:

Ahzani, W.K. Faizin (2021) Upaya Pemerintahan Tsai Ing-Wen Melawan Tekanan One-China Principle Pada Era Xi Jinping. *Jurnal Syntax Transformation* 2(4). <https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v2i3.252>

### E-ISSN:

2721-2769

### Published by:

Ridwan Institute

**Kata Kunci :**

Kedaulatan; One-China Principle; diplomasi negara kecil, pengakuan diplomatik.

upaya yang dilakukan oleh Taiwan dengan berfokus pada pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap kebijakan One-China Principle di era Xi Jinping. Peneliti juga akan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan lebih dalam mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Tsai Ing-wen, melalui konsep diplomasi negara kecil dan pengakuan diplomatik. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Tsai Ing-wen sudah cukup untuk mempertahankan kedaulatan mereka secara de facto, akan tetapi Taiwan tetap membutuhkan dukungan dari negara-negara besar untuk mempertahankan kedaulatan mereka dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Tiongkok.

**Pendahuluan**

Sejatinya sebelum Tiongkok memiliki kemiripan identitas seperti sekarang (Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Makau), Tiongkok memiliki satu identitas di bawah dinasti Qing yang masih berstatus kerajaan dan bersifat monarki hingga tahun 1912 (Cucchisi, 2002, p. 1). Runtuhnya dinasti Qing diakibatkan adanya revolusi yang dilakukan oleh Sun Yat-sen yang telah dirintis sejak tahun 1911 untuk mengakhiri sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, dan kemudian ingin mendirikan ROC (*Republic of China*) dan menciptakan pemilihan parlemen seperti di Eropa (CRF-USA, 2014, p. 1). Pemikiran-pemikiran demokratis menjadi gagasan yang dibawa oleh Sun Yat-sen untuk diterapkan ke Tiongkok pada saat itu; 'Tiongkok Baru' dengan tiga prinsip utama yaitu, nasionalisme, demokrasi, dan kemauan dari masyarakat yang kemudian diwujudkan melalui pembentukan partai KMT (*Kuomintang*) untuk mengimplementasikan tujuannya (CRF-USA, 2014). Namun sisa-sisa dinasti Qing belum sepenuhnya dapat dihilangkan dan kurangnya kekuatan militer juga menjadi kelemahan di pemerintahan Sun Yat-sen.

Namun sebelum Sun Yat-sen dapat memenuhi keinginannya secara utuh untuk mendirikan Tiongkok yang terunifikasi dan bersifat demokratis, dirinya telah meninggal di tahun 1925 dan kemudian visi tersebut dipercayakan dan dilanjutkan oleh Jenderal

Chiang Kai-shek. Jenderal Chiang Kai-shek merupakan orang yang dipercaya oleh Sun Yat-sen untuk bertanggung jawab atas Akademi Militer Whampoa yang sebelumnya didirikan olehnya pada tahun 1924, namun yang membedakan dengan pergerakan Sun Yat-sen adalah Jenderal Chiang memiliki kekuatan militer sebagai kekuatan cadangan atau pendukung untuk menggapai visi tersebut (Cucchisi, 2002). Dengan adanya kekuatan militer yang menjadikan pergerakan Jenderal Chiang semakin mudah untuk menundukkan Panglima Perang sisa-sisa dinasti Qing yang masih memiliki kekuasaan di beberapa wilayah; namun beberapa tetap menolak untuk tunduk dan Jenderal Chiang membiarkan hal tersebut untuk menghindari permasalahan lebih lanjut (Cucchisi, 2002). Namun keputusan Jenderal Chiang dinilai tidak tepat dikarenakan ke depan hal tersebut dapat menimbulkan ancaman baru.

Panglima Perang tidak hanya menjadi ancaman satu-satunya bagi kepemimpinan Jenderal Chiang, karena di tahun 1927 partai komunis mulai banyak memiliki dukungan dari lapisan masyarakat yang lain, yang sebenarnya hal tersebut terjadi karena kesalahan Sun Yat-sen dalam mengambil strategi. Singkatnya pada tahun 1917 Sun Yat-sen mendapatkan *aid packaging* untuk menjalankan pemerintahan, namun dengan syarat pembentukan front persatuan yang berupa CCP (*Chinese Communist Party*) untuk melawan Panglima Perang sisa dinasti

Qing (CRF-USA, 2014; Cucchisi, 2002). CCP yang pada saat itu dipimpin oleh Mao Tse-tung (Mao Zedong) semakin mendapat dukungan dari masyarakat dan momentum terjadinya dominasi komunis terjadi setelah adanya pendudukan Jepang dan terjadi pemberontakan dari CCP terhadap kepemimpinan KMT pada saat itu (Cucchisi, 2002).

Konflik tersebut yang menyebabkan adanya identitas ganda antara Tiongkok dengan Taiwan di masa depan. Diawali dengan adanya sengketa yang terjadi sekitar tahun 1930-an mengakibatkan beberapa kelompok mengungsikan diri ke pulau yang dihuni Taiwan saat ini. Kelompok CCP kemudian menciptakan identitas baru yakni PRC (*People's Republic of China*) pada tahun 1949 dan kemudian memunculkan klaim bahwa kedaulatan Taiwan merupakan milik pemerintahan PRC yang telah ditempati pemerintah ROC sejak tahun 1945. Dalam konstelasi politik internasional, Taiwan juga kalah lantaran pendapat mengenai *historical ownership*, *abrogation of the Treaty of Shimonoseki*, dan *the Cairo Declaration* dianggap tidak valid dalam hukum internasional (F. Y. Chiang, 2004). Namun Taiwan dapat disebut sebagai negara, melalui sudut pandang *de facto* atau secara *status quo* dengan kekuatan revisionis (Ross, 2006). Setelah redupnya ROC bagi perpolitikan internasional dan digantikan oleh PRC, ROC atau Taiwan menghadapi permasalahan baru yakni kebijakan *One-China Principle* yang menginginkan adanya unifikasi dengan satu identitas; Tiongkok (*mainland*).

Kebijakan *One-China Principle* bertahan hingga masa pemerintahan Xi Jinping, namun dalam pelaksanaan atau strategi yang diterapkan sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin Tiongkok sebelumnya. Jika para pemimpin sebelumnya berfokus mengenai bagaimana membangun unifikasi dengan Taiwan, dalam pemerintahan Xi Jinping

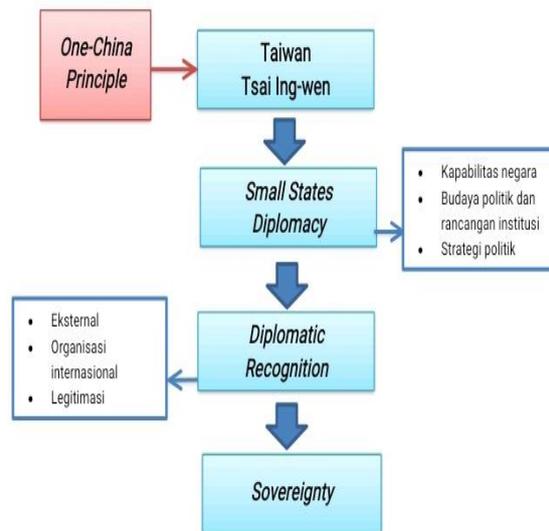
dirinya lebih berfokus pada upaya mencegah Taiwan untuk memperoleh kedaulatan mereka secara *de jure* (Huang, 2017, pp. 242–243). Di sisi lain, Xi Jinping tetap menyinggung mengenai unifikasi melalui narasi-narasi yang dikeluarkan; seperti anggapan dirinya bahwa unifikasi merupakan keinginan dari setiap bangsa *Chinese*, baik yang berada di dalam wilayah *mainland* atau yang berada di luar wilayah tersebut dengan dasar persamaan asal muasal dan budaya yang dibawa (Huang, 2017). Upaya dan narasi-narasi yang dikeluarkan tentu menjadi hambatan bagi Taiwan dalam mencapai kedaulatan secara *de jure*, mengingat Tiongkok merupakan negara besar yang memiliki pengaruh dalam perpolitikan internasional.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan Taiwan dengan Tiongkok terutama yang menyangkut permasalahan kedaulatan Taiwan secara *de jure*. Pertama dari (Bush & Hass, 2019) yang membahas mengenai sedikit perjuangan pemimpin Taiwan atas tekanan Tiongkok dan membahas sedikit sejarah Taiwan-Tiongkok; di sisi lain membahas mengenai bagaimana jalannya demokrasi di Taiwan. Kedua dari (Huang, 2017) membahas *One-China Principle* di era Xi Jinping dan strategi dirinya dalam menghalangi Taiwan untuk mencari dukungan lingkup internasional. Terakhir dari (Shattuck, 2020) membahas mengenai *checkbox diplomacy* dan *diplomatic recognition* sebagai bentuk upaya Taiwan dalam melawan tekanan *One-China Principle* dan berusaha untuk tetap bertahan dalam perpolitikan internasional di era kepemimpinan Tsai Ing-wen. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Tsai Ing-wen dalam memperjuangkan Taiwan dari tekanan-tekanan Tiongkok khususnya di era Xi Jinping; melalui pendekatan-pendekatan *small states diplomacy* dan *diplomatic recognition*.

### Metode Penelitian

Penelitian yang peneliti ambil adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, berusaha untuk menjelaskan secara lebih detail dan terstruktur dalam permasalahan atau peristiwa yang terjadi dengan melibatkan Taiwan di pemerintahan Tsai Ing-wen sebagai subjek pembahasan. Menurut Lamont penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang secara umum merujuk pada pengumpulan data yang bergantung pada data non-kuantitatif atau penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat didapatkan dengan menggunakan prosedur-prosedur numerik (Lamont, 2015). Kemudian untuk penelitian deskriptif menurut Gall M, Gall J, & Borg, digunakan untuk menjelaskan fenomena dan karakteristiknya serta umumnya menggunakan observasi atau survei untuk mengumpulkan data (Nassaji, 2015). Sehingga nantinya penelitian tersebut akan berusaha menjelaskan fenomena dan karakteristik dari upaya Taiwan dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan tolak ukur kuantitatif.

Peneliti akan menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa jurnal dan buku sebagai rujukan historis dan data utama, serta *website* pemerintahan dan institusi terkait. Peneliti juga menghimpun data melalui *website* berita seperti BBC, CNN, dan sejenisnya sebagai pelengkap data. Kemudian peneliti akan mengevaluasi setiap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kerangka berpikir yang berdasarkan pada *literature review* untuk menganalisis dan menjaga keurutan alur pembahasan. Adapun peneliti menggunakan sintesa pemikiran dari dua konsep yakni *small states diplomacy* dan *diplomatic recognition*.



Gambar 1  
Sintesa Pemikiran

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Taiwan dan Tsai Ing-wen

Taiwan merupakan negara kecil jika dibandingkan dengan Tiongkok, dengan perbandingan yang cukup jauh yakni 36.197 km<sup>2</sup> dan 9,595 juta km<sup>2</sup>. Taiwan dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki *status quo*; memiliki wilayah administratif, penduduk, dan pemerintahan yang menjalankan birokrasi di wilayah tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah status *de jure* (pengakuan dari negara lain) yang dimiliki Taiwan tercatat untuk sekarang hanya 15 negara yang masih mengakui keberadaan Taiwan dan di antara negara-negara tersebut tidak terdapat negara *superpower* yang mengakui keberadaan Taiwan (Shattuck, 2020). Sehingga pengakuan dari 15 negara tersebut tidak dapat diakui secara politis oleh lingkup internasional diakibatkan kurangnya pengakuan dari negara-negara *superpower* khususnya negara yang termasuk dalam Dewan Keamanan Tetap PBB; Inggris, Tiongkok, Perancis, Amerika Serikat, dan Rusia.

Taiwan sebelumnya sempat masuk dalam PBB dengan nama ROC sebelum

akhirnya keluar akibat munculnya PRC sebagai entitas baru yang menggantikan ROC di dalam kursi PBB pada tahun 1971 (Rich, 2009, p. 169). Kemunculan PRC pada saat itu juga diikuti dengan pernyataan,

*“after replacing the government of the Republic of China in 1949, the government of the P.R.C. has become the sole legal government of China, enjoying and exercising sovereignty over the whole of China, including Taiwan”* (F. Y. Chiang, 2004).

Bersamaan dengan pernyataan tersebut, pemerintahan Tiongkok menegaskan kedaulatan mereka. Pada tahun 1993-2008, Taiwan berusaha untuk memasuki PBB kembali dengan menggunakan dukungan aliansi yang dimiliki bahkan hingga menawarkan diri untuk masuk dengan status *“non-member entity”* (Rich, 2009). Namun usaha Taiwan tersebut tidak memiliki dampak sama sekali dan seiring berjalannya waktu, pengakuan-pengakuan dari negara lain berpindah ke Tiongkok.

Dalam perkembangan Taiwan hingga saat ini terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya; Presiden Lee Teng-hui (1988-2000) dan Chen Shui-bian (2000-2008) penanaman nasionalisme dengan penempatan beberapa tingkatan resiko yang mengancam keamanan nasional. Di sisi lain Ma Ying-jeou (2008-2016) menjalin dan mempromosikan kerjasama ekonomi serta menghindari provokasi Tiongkok. Kemudian Tsai Ing-wen (2016-sekarang) menghindari provokasi Tiongkok dan mempertahankan *status quo* (Bush & Hass, 2019). Rata-rata upaya yang dilakukan adalah dengan menghindari konflik secara langsung, mengingat Tiongkok memiliki kapabilitas ekonomi dan militer yang tentu akan merugikan Taiwan; pada masa pemerintahan Chen Shui-bian tercatat

bahwa Tiongkok pernah mengarahkan hampir 800 rudal balistik M-9 dan M-11 jarak pendek dari Provinsi Fujian serta kelengkapan militer seperti, pesawat militer Su-27 dan Su-30 yang dibeli dari Rusia (Ross, 2006).

Saat kampanye pemilihan dirinya, Tsai Ing-wen bahwa kebijakan yang akan dirinya ambil untuk menanggapi Tiongkok adalah dengan *“mempertahankan status quo”*. Keputusan Tsai Ing-wen merupakan bentuk dari keinginan masyarakat Taiwan sendiri yakni tidak terlalu mengupayakan lepas dari Tiongkok karena akan sangat beresiko bagi keamanan nasional, namun tetap menolak ajakan untuk reunifikasi (Glaser, 2016, p. 2). Setelah terpilih menjadi Presiden Taiwan di tahun 2016 mengambil sikap yang berani, dikutip dari *BBC.com* dirinya menyatakan bahwa Taiwan tidak perlu untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka, karena sejatinya Taiwan memang merupakan negara yang merdeka (Sudworth, 2020). Keberanian Tsai Ing-wen juga memiliki keterkaitan dengan partai pengusungnya yaitu DPP (*Democratic Progressive Party*) yang dikenal lebih berani dalam mengambil keputusan, sikap, atau kebijakan terkait hubungan lintas selat dengan Tiongkok jika dibandingkan dengan partai KMT (*Koumintang*) (Templeman, 2020, pp. 70–72). Pemerintahan Tsai Ing-wen juga dinilai lebih dekat dengan Amerika Serikat ditandai dengan masuknya Taiwan dalam *U.S. Visa Waiver Program*.

#### **B. *Small states diplomacy***

Bagi Payne, *small states* merupakan entitas dalam politik internasional yang jauh lebih rentan dibandingkan dengan memiliki peluang, dan peran mereka cenderung tertutup oleh negara-negara besar (Cooper & Shaw, 2009, p. 1). *Small states* sendiri juga tidak memiliki kemampuan untuk mengandalkan *pure power* dalam kancah perpolitikan

internasional, sehingga poin vitalnya adalah mereka dapat bertahan dalam tekanan dan dapat memenuhi ekspektasi akan kebijakan yang sebelumnya telah dibuat (Paterson, 1969, p. 119). Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan dalam mengambil peran di perpolitikan internasional; pertama melalui kapabilitas negara, tidak hanya berfokus pada sumber daya manusia, tanah, sumber daya alam, atau uang, melainkan posisi geografis (Bueger & Wivel, 2018, p. 8). Kedua adalah budaya politik dan rancangan institusi, tentu dengan melihat suku, ras, budaya, adat istiadat, dan identitas bangsa; rancangan institusi dapat berupa lembaga domestik atau di lingkup internasional (Bueger & Wivel, 2018). Ketiga adalah strategi politik dari *small states* dalam menyiapkan strategi di perpolitikan internasional yang dinilai akan menunjang kepentingan nasional mereka (Bueger & Wivel, 2018).

Karena permasalahan itu, maka negara-negara kecil menerapkan *small states diplomacy*; upaya tersebut merupakan usaha non-koersif dari negara-negara kecil yang rentan dalam memperjuangkan kepentingan nasional dengan usaha-usaha diplomatis demi menjaga eksistensi dan peran mereka di lingkup internasional (Thorhallsson & Bailes, 2016, pp. 297–298). Negara dapat dikategorikan sebagai negara kecil dengan memerhatikan beberapa hal yakni menurut Jalan (1982), penduduk maksimal menyentuh lima juta jiwa, luas wilayah kurang dari 65.000 km<sup>2</sup>, dan PDB lebih rendah atau sama dengan \$3.000 juta (Brito, 2015). Namun dari banyaknya indikator untuk menetapkan suatu negara sebagai *small states*, wilayah menjadi faktor yang paling utama dikarenakan cukup memungkinkan bagi negara kecil untuk tetap memiliki populasi dan PDB yang lebih dari batasan tersebut, begitu

juga sebaliknya (Thorhallsson, 2018, p. 18). Maka dari itu, dalam hal ini Taiwan dapat dikategorikan sebagai negara kecil.

Jika menggarisbawahi penjelasan Bueger & Wivel (2018), maka Taiwan dapat memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki khususnya di bidang ekonomi, budaya politik dan rancangan institusi dengan meninjau politik domestik, serta strategi politik di lingkup internasional. Kapabilitas yang sebelumnya disinggung yakni dengan memanfaatkan *geostrategic position*.



**Gambar 2**  
**Lokasi Taiwan**

Wilayah Taiwan yang terlihat sangat kecil tetapi cukup strategis, berada di sebelah Tenggara dari pulau utama Tiongkok; sebelah Selatan dari Taiwan yakni terdapat negara-negara ASEAN dan di sebelah Timur Laut terdapat Korea Selatan dan Jepang. Taiwan dapat menjalin kerjasama non-diplomatik dengan beberapa negara tersebut. Mengingat ASEAN menjadi destinasi ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok dengan total ekspor 17,3 % dan Jepang urutan kelima dengan total ekspor 6,9 % . Lalu Jepang juga berkontribusi pada pemasukan Taiwan melalui FDI (*Foreign Direct Investment*) sebesar 1,53 Miliar USD, sedangkan untuk wilayah ASEAN yakni negara Vietnam dengan pemberian

ODI (*Outward Direct Investment*) sebesar 914 juta USD (Taiwan, 2018a).

Kapabilitas secara ekonomi dapat dimanfaatkan oleh Taiwan, mengingat keterbatasan dalam menjalin hubungan diplomatis dengan negara lain. Beberapa pilar ekonomi yang diandalkan oleh Taiwan adalah agrikultur, industri, dan *service*.

**Tabel 1**  
**Pilar Ekonomi Taiwan**

Tahun	Agri.	Ind.	Serv.
2016	1,9 %	36,9 %	61,3 %
2017	1,8 %	37,0 %	61,6 %
2018	1,7 %	36,7 %	62,3 %
2019	1,8 %	35,6 %	62,1 %

Sumber : (Textor, 2020)

Pada sektor agrikultur Taiwan mengandalkan lima komoditas untuk diekspor yaitu ikan mahi-mahi, nanas, beras, teh, dan ikan bandeng (Taiwan, 2020). Di sektor industri didominasi dengan produk-produk elektronik, tercatat pada November 2020 dengan ekspor bagian-bagian elektronik (19,5 %), produk informasi, komunikasi, dan audio-video (18,5 %), plastik dan karet (11 %) (*Taiwan Exports*, 2020). Lalu untuk sektor *service* umumnya ditunjang melalui sektor akomodasi wisata dan pajak.

Kedua adalah membahas mengenai budaya politik dan rancangan institusi di dalam Taiwan. Sistem politik yang dijalankan oleh Taiwan adalah sistem multipartai dan bersifat presidensial, namun dalam dua periode terakhir pemilihan presiden didominasi oleh KMT dan DPP. Dari tiga calon yang mengajukan diri di pemilihan tahun 2016 dan 2020, suara masih didominasi oleh KMT dan DPP; di dua periode tersebut juga Tsai Ing-wen berhasil terpilih mewakili DPP *head-to-head* dengan KMT yang sebelum tahun 2016 lebih mendominasi perpolitikan domestik

(Strong, 2020). Pada periode pertama setelah terpilih, Tsai Ing-wen memiliki beberapa agenda yakni; (1) secara simbolis yakni dengan wacana untuk mengganti bendera nasional dan mempertegas makna wilayah nasional, (2) secara umum seperti, menurunkan batas usia pemilih, perubahan majelis dan *Parade Act*, (3) secara fundamental yakni perubahan dari struktur pemerintahan yang bersifat semi-presidensial menjadi presidensial atau parlementer dan menghapuskan keterlibatan *Control Yuan* serta *Examination Yuan* (Templeman, 2020).

Tetapi dalam perjalanannya, keinginan tersebut tidak langsung dapat dicapai secara instan. Tsai Ing-wen yang sejak awal tidak diuntungkan dengan kondisi Taiwan dalam politik internasional tentu tidak akan mengambil resiko dengan perubahan yang radikal dengan waktu yang singkat seperti bendera atau fundamental dalam pemerintahan. Bendera Taiwan yang masih memiliki keterikatan identitas dengan daratan utama melalui warna merah; tentu akan mengundang masalah besar jika bendera tersebut dirubah. Konstelasi politik domestik antara DPP dengan KMT tentu akan mulai bergejolak jika agenda tersebut benar-benar terlaksana dan mengakibatkan stabilitas politik domestik menjadi terganggu. Maka agenda seperti menghapuskan *Control Yuan* dan *Examination Yuan*, bergeser menjadi pengusulan nama untuk mengganti keanggotaan agar terlepas dari pengaruh Ma Ying-jeou (Presiden sebelumnya dari KMT) dan pada pemerintahan Tsai Ing-wen ingin melepaskannya dari pengaruh-pengaruh KMT (Templeman, 2020).

Ketiga adalah strategi politik yang dilakukan oleh pemerintahan Tsai Ing-wen untuk bertahan di perpolitikan internasional. Pada saat Tsai Ing-wen menjabat, bertepatan dengan Donald

Trump yang sedang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam masa pemerintahan Tsai Ing-wen, Taiwan dinilai dekat dengan Amerika Serikat melalui hubungan non-diplomatik yang diwujudkan dalam beberapa hal, misalnya adalah transaksi alutsista untuk menopang keperluan militer Taiwan yang mencapai 8 miliar USD untuk membeli 66 pesawat tempur tipe F-16 dan mesin *General Electric* serta beberapa kelengkapan yang lain (BBC, 2019). Kondisi tersebut meyebabkan Tiongkok marah dikarenakan kerjasama tersebut tidak melalui Tiongkok terlebih dahulu, mengingat Taiwan masih di bawah administratif Tiongkok bagi Xi Jinping. Tsai Ing-wen juga cerdas dalam memanfaatkan situasi yang semakin memanas akibat perang dagang AS-Tiongkok, dengan menjalin kerjasama dagang yang kemudian meningkatkan ekspor dagang sebesar 2 % di tahun 2019 dan desakan Kementerian Amerika Serikat bagai perusahaan besar AS untuk berinvestasi di Taiwan (M.-H. Chiang, 2020).

Dampak dari kerjasama Taiwan-AS dalam pemebelian alutsista juga menunjang keseimbangan kekuatan di Selat Taiwan-Tiongkok, sehingga menghambat Tiongkok bertindak lebih agresif terhadap Taiwan (P.-K. Chen, 2017, pp. 228–230). Di sisi lain, Tsai Ing-wen juga memiliki kebijakan lain yang ingin diterapkan demi mencapai kepentingan nasional Taiwan; *New Southbound Policy* yakni diplomasi yang berfokus ke arah Selatan (ASEAN, Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru), berfokus ke kerjasama ekonomi dan perdagangan. Tujuan lain dari adanya kebijakan tersebut adalah karena Taiwan dinilai masih bergantung kepada Tiongkok dalam kegiatan perekonomian, melingkupi ekspor dan impor (Black, 2019, p. 251). Sebagai

contoh kasus, pada tahun 2018 dari total ekspor sebesar 335,9 miliar USD dan impor sebesar 286,3 miliar USD (*balance* : 49,6 miliar USD); Tiongkok berkontribusi bagi tujuan ekspor Taiwan (41,2 %), dan impor (19,3 %) (Taiwan, 2018a). Strategi lainnya adalah dengan pemberian ODI kepada beberapa negara, tercatat pada periode pertama Tsai Ing-wen (2016-2019) Taiwan telah memberikan dana sebesar kurang lebih 59,417 juta USD (UNCTAD, 2020).

### C. *Diplomatic Recognition*

Negara tentu membutuhkan status berdaulat untuk dapat menjalin kerjasama diplomatik dengan banyak negara demi mencapai kepentingan nasional mereka. Kedaulatan sendiri dapat diartikan sebagai otoritas meta-politik sebagai penggerak pemerintahan dan wewenang yang dimiliki dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, atau keilmuan bagi negara sendiri (Thomson, 1995). Kemudian dalam memenuhi kedaulatan tersebut menurut Thomson, suatu negara membutuhkan wilayah, pemerintahan, politik domestik (birokrasi), kekuatan koersif (aparatur keamanan), dan pengakuan negara lain (Thomson, 1995). Kedaulatan sendiri dibagi menjadi dua, yakni kedaulatan internal dan eksternal; kedaulatan internal umumnya mencakup masalah pemerintahan dan birokrasi, wilayah, dan penduduk yang melingkupi persyaratan *de facto* suatu negara (Rich, 2009). Sedangkan untuk kedaulatan eksternal yakni mencakup pengakuan negara lain atas kedaulatan yang dimiliki suatu negara dalam perpolitikan internasional, sehingga nantinya negara tersebut dapat melakukan kerjasama diplomatik dengan negara lain (Rich, 2009).

Maka *diplomatic recognition* berfungsi untuk mencapai kedaulatan negara secara eksternal (*de jure*) agar negara dapat diakui oleh negara lain,

terlebih dalam lingkup kerjasama yang bersifat diplomatis. Hal tersebut menjadi tuntutan yang harus dipenuhi bagi setiap negara, dikarenakan negara akan dianggap setara dan pantas dalam melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain (Shattuck, 2020). Dengan tercapainya kedaulatan eksternal, diharapkan negara mendapatkan legitimasi dalam menjalin hubungan diplomatis dan mudah dalam manuver politik internasional serta negara dapat berperan lebih dalam organisasi internasional (Shattuck, 2020). Dalam perjalanannya, *diplomatic recognition* sering bertumpu pada perekonomian domestik dan bagaimana pengaruhnya dalam perdagangan internasional; ekspor dan impor (Newnham, 2000, p. 260). Tiga hal yang dapat digarisbawahi dari *diplomatic recognition* adalah kedaulatan eksternal, legitimasi, dan keterlibatan dalam organisasi internasional.

Pertama yakni mengenai kedaulatan secara ekseternal atau *de jure* yang diupayakan oleh Taiwan dalam pemerintahan Tsai Ing-wen. Secara konsep, Taiwan sebenarnya dapat dikatakan sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat; meskipun berkonfrontasi dengan Tiongkok setidaknya masih terdapat 15 negara yang mengakui kedaulatan Taiwan yakni Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Marshall Islands, Haiti, Palau, Nauru, Kingdom of Eswatini, Belize, Sain Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Tuvalu, Vatican City State (Shattuck, 2020). Namun keberadaan negara-negara tersebut kurang kuat untuk menjaga kedaulatan Taiwan di dunia internasional dikarenakan tidak adanya dukungan dari negara-negara *superpower* seperti anggota Dewan Keamanan Tetap PBB (Shattuck, 2020). Penurunan secara signifikan dirasakan Taiwan di rentang

tahun 1971-1979 setelah dipaksa keluar dari PBB dan digantikan dengan Tiongkok; Presiden Taiwan pada saat itu memutuskan untuk memutus hubungan diplomatis dengan 44 negara yang mengakui kedaulatan Tiongkok (Rich, 2009).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Taiwan sebelumnya, salah satunya adalah pemberian *aid packaging* pada negara-negara yang masih mengakui kedaulatan Taiwan atas Tiongkok. Tepatnya upaya tersebut dilakukan di rentang tahun 1900-an hingga tahun 2000-an dan menyebabkan *checkbook diplomacy* dengan Tiongkok; sehingga keduanya berlomba-lomba untuk memberikan *aid packaging* demi 'membeli' pengakuan negara lain (Shattuck, 2020). Di era Tsai Ing-wen strategi *checkbook diplomacy* tersebut dicabut karena dinilai tidak strategis untuk Taiwan jika harus berlomba dengan Tiongkok yang memiliki kapabilitas ekonomi lebih besar; dengan perbandingan kontribusi PDB terhadap ekonomi dunia di tahun 2019 yakni 0,50 % banding 11,81 % (Economics, 2020b, 2020a). Tsai Ing-wen juga mempertegas bahwa Taiwan akan mencabut *aid packaging* bagi negara-negara yang masih mengakui dan bekerjasama secara diplomatis dengan pihak Beijing (Shattuck, 2020).

Kedua adalah mengenai legitimasi yang dimiliki oleh Taiwan sebagai modal untuk mempertahankan eksistensinya dalam perpolitikan internasional. 15 negara yang masih setia menjalin hubungan diplomatis dengan Taiwan, tentu tidak cukup untuk mempertahankan legitimasi Taiwan dan tentu tidak ada jaminan bagi negara-negara tersebut untuk tidak akan membatalkan pengakuan mereka. Terlebih lagi ke-15 negara tersebut merupakan negara yang berkembang dan menempati peringkat

yang relatif rendah jika dibandingkan beberapa negara yang menjadi 10 besar rekan dagang Taiwan; Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Jerman, Vietnam, Australia (Shattuck, 2020). Taiwan diharapkan dapat menjalin kerjasama non-diplomatik dengan kesepuluh negara tersebut hingga pada akhirnya dapat menciptakan interdependensi yang berkelanjutan, tentu akan menguntungkan bagi Taiwan. Hal yang cukup menjadi perhatian bagi pemerintah Taiwan adalah ketergantungan secara ekonomi dengan Tiongkok masih cukup tinggi dengan total dagang sebesar 528.596.644.887 USD.

Kedekatan Tsai Ing-wen dengan pemerintahan Trump tidak hanya melalui *U.S. Visa Waiver Program* yang menjadikan Taiwan sebagai satu-satunya negara tanpa hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang mendapat kesempatan tersebut (Taiwan, 2018b). Status Taiwan sebagai negara yang bersifat demokratis jika dibandingkan dengan Tiongkok, sehingga pemerintahan Trump dan Tsai Ing-wen bersama-sama menjalin kerjasama non-diplomatik untuk mengangkat profil demokrasi Taiwan di lingkup internasional (D. P. Chen, 2019, p. 252). Amerika Serikat tidak mendukung Taiwan secara terang-terangan demi menghindari konflik terbuka dengan pihak Beijing, tetapi Amerika Serikat secara tidak langsung juga mengambil kesempatan untuk memiliki orientasi kerjasama dengan Taiwan; ditandai dengan adanya TTA (*Taiwan Travel Act*), masuknya Taiwan pada agenda NDAA (*National Defense Authorization Act*), dan AIT (*American Institute in Taiwan*) (D. P. Chen, 2019). Kerjasama tersebut seakan menitik beratkan bahwa Taiwan merupakan negara yang penting bagi Amerika Serikat, dan sebagai

penyeimbang kekuatan di selat Tiongkok-Taiwan untuk mencegah konflik terbuka dengan pihak Beijing.

Ketiga adalah bagaimana Taiwan mengoptimalkan perannya dalam organisasi internasional, setelah sebelumnya pada tahun 1993-2008 Taiwan tetap tidak dapat memperjuangkan untuk memasuki PBB kembali. Posisi Tiongkok yang menjadi Dewan Keamanan Tetap PBB semakin memperkecil kesempatan Taiwan untuk duduk dalam kursi PBB meskipun dengan status “*non-member entity*”. Manuver yang dapat dilakukan oleh Taiwan hanya dengan mengandalkan sektor perdagangan dan perekonomian untuk menjaga kedaulatan serta keberadaannya tetap ‘terlihat’ secara politik internasional. Maka kesempatan yang dimiliki oleh Taiwan adalah turut serta terlibat dalam perdagangan internasional melalui institusi internasional yaitu WTO (*World Trade Organization*). Di dalam WTO, terdapat pembagian regional dagang untuk memudahkan masing-masing negara berkoordinasi; di regional Asia terdapat *TPP Agreement (The Trans-Pacific Partnership)* yang merupakan usulan dari Amerika Serikat dan *RCEP Agreement (Regional Comprehensive Economic Partnership)* yang dipimpin oleh Tiongkok (Wang et al., 2017, p. 2).

RCEP tentu tidak akan menjadi pilihan utama bagi Taiwan dikarenakan kesepakatan tersebut dipimpin langsung oleh Tiongkok, yang secara tidak langsung tidak akan menyepakati kehadiran Taiwan; maka Taiwan dapat berupaya untuk memasuki TPP yang dinilai dapat memberikan 36 % PDB bagi perekonomian dunia (Wang et al., 2017). Pada tahun 2020, *The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu*, menyumbang kurang lebih 150.000 USD untuk membantu negara-negara

berkembang dalam *Ministerial Conference* ke-12. Frederick Agah selaku Wakil Direktur Jendral WTO menanggapi dengan sangat baik,

*“The donation by the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu will help officials from LDCs participate actively in MC12 and will lay the groundwork for new market opportunities for businesses in their countries. I thank the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu for its generosity.”* (WTO, 2020)

Tindakan yang dilakukan Taiwan tersebut sekaligus untuk mempertegas posisi Taiwan sebagai negara yang memiliki kontribusi bagi negara-negara berkembang dan memiliki peran di dalam WTO.

### Kesimpulan

Dalam perjalanan kedaulatan Taiwan secara utuh baik internal dan eksternal dari beberapa kepemimpinan memiliki beberapa pendekatan yang memiliki satu kesamaan yaitu menghindari konfrontasi secara langsung dengan pihak Tiongkok, baik secara ekonomi, politik, atau bahkan dari segi militer. Sehingga sejak awal, Taiwan telah menyadari bahwa mereka merupakan negara kecil yang selain bermasalah mengenai status *de jure*, juga memiliki hambatan besar yakni Tiongkok dengan segala kelebihan mereka (wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, militer, ekonomi, dan status politik di lingkup internasional). Taiwan hanya dapat mengupayakan potensi melalui perekonomian dan perdagangan, mengingat mereka sangat sulit untuk melakukan kerjasama secara diplomatis; selain karena status kedaulatan mereka yang belum jelas secara *de jure*, beberapa negara tidak mau mengambil resiko dengan bermusuhan secara diplomatik dengan Tiongkok.

Penggunaan potensi Taiwan melalui analisis *small states diplomacy* dan

*diplomatic recognition* dapat disimpulkan dalam beberapa hal; pertama, Taiwan hanya dapat menggunakan strategi hubungan non-diplomatik dengan negara-negara di luar 15 negara utama yang mengakui Taiwan. Kedua, Taiwan harus mengoptimalkan ekspor terutama di lima komoditas utama kepada beberapa target *market* yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia Tenggara, dan Oceania. Ketiga adalah optimalisasi peran di organisasi internasional seperti WTO khususnya di lingkup *TPP Agreement* dikarenakan terdapat Amerika Serikat yang menjadi tumpuan dalam organisasi tersebut. Selain itu, pembangunan kantor dagang seperti TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) perlu untuk digalakkan di beberapa negara Eropa yang dinilai cukup lepas dari pengaruh Tiongkok sebagai bentuk *soft diplomacy*; namun dengan tetap menggunakan cara-cara non-diplomatik, sehingga ke depan dapat timbul interdependensi setidaknya dimulai dalam bidang perekonomian terlebih dahulu sebelum beranjak di lingkup yang lebih politis.

### BIBLIOGRAFI

- BBC. (2019). *China Ancam Amerika Serikat Karena Jual Pesawat Tempur ke Taiwan*. BBC.
- Black, L. (2019). Evaluating Taiwan's New Southbound Policy. *Asian Survey*, 59(2), 246–271. <https://doi.org/10.1525/as.2019.59.2.246> [Google Scholar](#).
- Brito, J. A. (2015). Munich Personal RePEc Archive Defining Country Size: A Descriptive Analysis of Small and Large States. *MPRA Paper*, 1–28 [Google Scholar](#).
- Bueger, C., & Wivel, A. (2018). How do small island states maximize influence? Creole diplomacy and the smart state foreign policy of the Seychelles. *Journal*

- of the Indian Ocean Region*, 14(2), 170–188.  
<https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1471122> [Google Scholar](#).
- Bush, R., & Hass, R. (2019). *Taiwan's democracy and the China challenge*. 13 [Google Scholar](#).
- Chen, D. P. (2019). The Trump Administration's One-China Policy: Tilting toward Taiwan in an Era of U.S.-PRC Rivalry? *Asian Politics & Policy*, 11(2), 250–278.  
<https://doi.org/10.1111/aspp.12455> [Google Scholar](#).
- Chen, P.-K. (2017). A Farewell to Arms? US Security Relations with Taiwan and the Prospects for Stability in the Taiwan Strait. In *Taiwan and China: Fitful Embrace* (pp. 221–238). University of California Press.  
<https://doi.org/10.1525/luminos.38.1> [Google Scholar](#).
- Chiang, F. Y. (2004). One-China Policy and Taiwan. *Fordham International Law Journal*, 28(1), 1–87 [Google Scholar](#).
- Chiang, M.-H. (2020). Taiwan's Economy in 2019: Reaping Benefits from the US–China Trade War. *East Asian Policy*, 12(01), 72–82.  
<https://doi.org/10.1142/S1793930520000069> [Google Scholar](#).
- Cooper, A. F., & Shaw, T. M. (2009). The Diplomacies of Small States at the Start of the Twenty-first Century: How Vulnerable? How Resilient? In *The Diplomacies of Small States* (pp. 1–18). Palgrave Macmillan UK.  
[https://doi.org/10.1057/9780230246911\\_1](https://doi.org/10.1057/9780230246911_1) [Google Scholar](#).
- CRF-USA. (2014). The Chinese Civil War: Why Did the Communists Win? *Bill of Rights in Action*, 29(4), 1–4.
- Cucchisi, L. J. (2002). *The Causes and Effects of the Chinese Civil War, 1927-1949*. Seton Hall University.
- Economics, T. (2020a). *China GDP*. Trading *Syntax Transformation*, Vol. 2 No. 4, April 2021
- Economics, T. (2020b). *Taiwan GDP*. Trading Economics.
- Glaser, B. S. (2016). Prospects for Cross-Strait relations as Tsai Ing-wen assumes the presidency in Taiwan. In *Center for Strategic & International Studies* [Google Scholar](#).
- Huang, J. (2017). Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China: Fitful Embrace* (pp. 239–248). University of California Press [Google Scholar](#).
- Lamont, C. K. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage Publication Ltd.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132.  
<https://doi.org/10.1177/1362168815572747> [Google Scholar](#).
- Newnham, R. E. (2000). Embassies for Sale: The Purchase of Diplomatic Recognition by West Germany, Taiwan and South Korea. *International Politics*, 37(3), 259–283.  
<https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8890495> [Google Scholar](#).
- Paterson, W. E. (1969). Small States in International Politics. *Cooperation and Conflict*, 4(1), 119–123.  
<https://doi.org/10.1177/001083676900400107> [Google Scholar](#).
- Rich, T. S. (2009). Status for sale: Taiwan and the competition for diplomatic recognition. *Issues and Studies*, 45(4), 159–188 [Google Scholar](#).
- Ross, R. S. (2006). Explaining Taiwan's Revisionist Diplomacy. *Journal of Contemporary China*, 15(48), 443–458.  
<https://doi.org/10.1080/10670560600736442> [Google Scholar](#).
- Shattuck, T. J. (2020). The Race to Zero?:

- China's Poaching of Taiwan's Diplomatic Allies. *Orbis*, 64(2), 334–352.  
<https://doi.org/10.1016/j.orbis.2020.02.003> [Google Scholar](#).
- Strong, M. (2020). *Taiwan President Tsai Ing-wen wins election with record 8.17 million votes*. Taiwan News.
- Sudworth, J. (2020). *China Needs to Show Taiwan Respect, Says President*. BBC [Google Scholar](#).
- Taiwan. (2018a). *Economy*. Taiwan Government.
- Taiwan. (2018b). *Foreign Affairs*. Taiwan Government.
- Taiwan. (2020). *Promoting International Marketing of Agriproducts*. Council of Agriculture.
- Taiwan Exports*. (2020). Trading Economics.
- Templeman, K. (2020). *Politics in the Tsai Ing-wen Era. Taiwan: The Development of an Asian Tiger*. Lynne Rienner Publishers [Google Scholar](#).
- Textor, C. (2020). *Breakdown of the gross domestic product (GDP) of Taiwan from 2015 to 2019, by economic sector*. Statista.
- Thomson, J. E. (1995). State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research. *International Studies Quarterly*, 39(2), 213.  
<https://doi.org/10.2307/2600847> [Google Scholar](#).
- Thorhallsson, B. (2018). Studying Small States: A Review. *Small States & Territories*, 1(1), 17–34 [Google Scholar](#).
- Thorhallsson, B., & Bailes, A. J. K. (2016). Small State Diplomacy. In *The SAGE Handbook of Diplomacy* (Issue March, pp. 294–307). SAGE Publications Ltd.  
<https://doi.org/10.4135/9781473957930.n25> [Google Scholar](#).
- UNCTAD. (2020). *Country Fact Sheet: Taiwan Province of China*.
- Wang, J.-C., Lee, J.-S., & Ma, Y.-C. (2017). TPP, trade-off and eco-system establishment in Taiwan. *Bandung: Journal of the Global South*, 4(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.1186/s40728-017-0041-x> [Google Scholar](#).
- WTO. (2020). *Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu gives TWD 4.5 million for LDCs at Ministerial Conference*. World Trade Organization.

---

**Copyright holder:**

W.K. Faizin Ahzani (2021).

**First publication right:**

Jurnal Syntax Transformation

**This article is licensed under:**

